



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

## **SKRIPSI**



**MEDIA PAN KHARSYI  
07 140 266**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

# **PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

(MEDIA PAN KHARSYI; BP : 07140266 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63  
Halaman, Tahun 2011)

## **ABSTRAK**

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Persoalannya menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Salah satu yayasan pendidikan yang sedang berkembang di daerah Dharmasraya adalah Yayasan Darul Hikmah. Perkembangan Yayasan Darul Hikmah merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut. Terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan, menyusun usulan rencana penggabungan sekiranya akan terjadi penggabungan. Selain menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Pengurus memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah dan menemui berbagai macam kendala dilapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan praktek yang terjadi pada yayasan Darul Hikmah Kabupaten Dharmasraya, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus memiliki fungsi untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan seperti tenaga pendidik, bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi, dan berkewajiban untuk menyusun laporan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup. Dalam meningkatkan perkembangan yayasan darul Hikmah Dharmasraya, pengurus menemui kendala seperti penunggakan uang sekolah oleh santri, dan kurangnya perhatian dan kerjasama dengan pemerintah setempat mengakibatkan minimnya bantuan yang diterima oleh yayasan Darul Hikmah Kabupaten Dharmasraya, penelitian ini menyarankan agar Yayasan Darul Hikmah dalam menghadapi penunggakan uang sekolah bagi santri pengurus Yayasan Darul Hikmah semestinya membuat program pemberian bea siswa pada siswa tidak mampu dan berprestasi. Hal ini bertujuan untuk mebantu santri demi kelangsungan proses belajar mengajar para santri. Pengurus Yayasan Darul Hikmah harus lebih mendekatkan diri pada pemerintah, dengan tujuan pemerintah lebih memperhatikan yayasan. Mengajukan proposal pada pemerintah apabila ingin bantuan dari pemerintah.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum .....	12
1. Pengertian dan Pengaturan Badan Hukum.....	12
2. Penggolongan Badan Hukum.....	15
3. Teori Badan Hukum.....	17
4. Syarat- syarat Badan Hukum.....	20
5. Berakhirnya Badan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	21
1. Pengertian Yayasan .....	22
2. Tujuan Yayasan .....	26
3. Pengaturan Yayasan.....	27
4. Pendirian Yayasan .....	30
5. Organ Yayasan .....	38
6. Harta Kekayaan Yayasan.....	45



7. Pembubaran Yayasan.....	50
----------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	52
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	52
2. Maksud dan Tujuan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	53
3. Struktur Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	55
4. Kekayaan dan Pendapatan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	60
5. Kegiatan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	61
B. Peranan Pengurus Dalam Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya .....	62
C. Kendala Pengurus Dalam Meningkatkan Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya.....	67

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik itu berupa moril maupun nonmoril, Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda **Khairuddin, SE., MM** dan ibunda **Syaflidar, SE** yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta do'a yang tiada henti diucapkan untuk keberhasilan penulis dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat yang ikut memberikan motivasi dan saran-saran yang membangun dalam penyelesaian sripsi ini.

Penulis juga mangucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Zahara, S.H., M.H sebagai Pembimbing I, ibu Mardalena Hanifah, S.H.,M.,H sebagai Pembimbing II dan ibu Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan nasehat yang berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dalam format yang baik, detail dan sistematis.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin adegustara SH. MS Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak Dr. kurniawarman, SH. M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Syahrial Razak, SH.MH. dan Ibu Misnarsyam, SH.MH, sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Perdata yang telah memberikan kemudahan dalam urusan akademik.
6. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah menyediakan waktunya dalam menguji penulis.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
8. Seluruh karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi Penulis dalam Penulisan Skripsi ini.
9. Bapak Syawal selaku Organ Pengurus Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya yang telah memberikan kemudahan, kesempatan dan mengizinkan Penulis untuk mengadakan penelitian guna melengkapi data skripsi ini.
10. Teman-teman Penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

11. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang paling berharga yang dapat Penulis berikan kepada mereka kecuali do'a yang tulus Semoga amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2011

Penulis

MEDIA PAN KHARSYI





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Yayasan yang dikenal sekarang ini sebenarnya merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dengan nama *Stichting*.

Maksud lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Yayasan selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.<sup>1</sup>

Banyaknya yayasan yang tumbuh dan berkembang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan yang mengatur jalannya yayasan. Pada awalnya yayasan di Indonesia tidak memiliki landasan hukum tertulis sehingga yayasan dalam praktiknya mengalami banyak kendala, seperti yayasan bersifat tertutup, status hukumnya tidak jelas, dan pengelolaannya belum ke arah profesional.

---

<sup>1</sup> Anwar borahima, *Kedudukan yayasan di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2010, hlm 19

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahir undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Terdapat beberapa substansi dari undang-undang tentang yayasan ini yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memerlukan suatu aturan tentang pelaksanaannya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Tujuan diubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Perubahan undang-undang yayasan dilakukan bukan untuk penggantian undang-undang, dalam arti undang-undang yang lama diganti dengan yang baru. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan itu hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak



mengubah seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.<sup>2</sup> Dengan adanya perubahan tersebut, kedua undang-undang itu saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia, sebab sebelum undang-undang yayasan diberlakukan keberadaan yayasan selalu mengundang kontroversi terhadap status yayasan dan tujuan yayasan. Undang-Undang tentang Yayasan dapat menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pemisahan harta kekayaan bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian harta pribadi atau harta bersama pendiri.

Dalam pendirian yayasan pendiri harus memahami benar tentang persyaratan yang terkait dengan mendirikan yayasan. Persyaratan yang harus terkait pendiri yayasan meliputi syarat subjek pendiri yayasan, syarat nama yayasan, syarat kekayaan yayasan yang harus dipisahkan dan syarat dokumen yang diperlukan. Selain memenuhi aspek-aspek yuridis yang terkait dengan yayasan harus dilakukan juga kesepakatan-kesepakatan penting antara para pendiri yayasan yang kemudian ditulis dalam Anggaran Dasar Yayasan sehingga membuat rencana kerja.

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 9



Anggaran Dasar dibuat berdasarkan kesepakatan para pendiri yayasan, Anggaran Dasar ini akan dimuat kedalam akta pendirian Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta pendirian Yayasan ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Yayasan sebagai badan hukum sosial dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelangsungan suatu yayasan dalam mendapatkan modal untuk menjalankan kegiatannya agar mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan badan hukum yayasan. Tujuan dari yayasan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Persoalannya menjadi lain apabila lembaga pendidikan itu diselenggarakan bagi keuntungan pemiliknya. Merupakan salah satu sebab mengapa yayasan pendidikan berkembang dengan pesat. Di daerah Dharmasraya cukup banyak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat dalam melaksanakan tujuannya untuk memajukan pendidikan. Salah satu yayasan yang sedang berkembang di daerah Dharmasraya adalah Yayasan Darul Hikmah.

Perkembangan Yayasan Darul Hikmah merupakan hasil dari kerja keras organ yayasan tersebut, terutama pengurus yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pengurus yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan, menyusun usulan rencana penggabungan sekiranya akan terjadi penggabungan. Dalam menjalankan tugasnya pengurus juga memiliki kewajiban yaitu menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Kinerja pengurus dalam yayasan sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu yayasan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul **“PERANAN PENGURUS TERHADAP PERKEMBANGAN YAYASAN DARUL HIKMAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.
2. Apakah kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya dan penyelesaiannya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya serta cara penyelesaiannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu



memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>3</sup>

Adapun manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di Yayasan Darul Hikmah kabupaten Dharmasraya.
- b. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum yayasan.
- c. Menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pengurus

Sebagai bahan masukan dan pengembangan pengetahuan sebagai bagian yang penting yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu peranan pengurus terhadap perkembangan yayasan.

b. Bagi yayasan

Sebagai bahan bagi yayasan untuk mengembangkan yayasan dengan pengetahuan dan wawasan baru yang penulis buat untuk kemajuan yayasan, terutama dalam hal perkembangan yayasan yang dilakukan oleh pengurus dalam rangka meningkatkan perkembangan yayasan

---

<sup>3</sup> Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, suatu pendekatan proposal*, UGM Prees, Yogyakarta, 1995. Hlm. 25.



c. Bagi masyarakat

Agar penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan memberikan masukan kepada pihak terkait dalam meningkatkan perkembangan yayasan.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan di bahas dikaitkan dengan praktik di Yayasan Darul Hikmah kabupaten Dharmasraya yaitu tentang peranan pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang peranan pengurus terhadap perkembangan yayasan Darul Hikmah di Kabupaten Dharmasraya.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian didapatkan melalui :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya ilmiah yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

Data tersebut penulis peroleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c. Literatur serta bahan kuliah yang penulis miliki sendiri.
- d. Perpustakaan dan sumber – sumber lainnya yang bisa menunjang kelancaran penulisan skripsi ini.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai sejauh mana peranan pengurus dalam mengembangkan Yayasan Dharul Hikmah.

## 4. Jenis Data

### a. Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya yaitu ketua yayasan, bendahara yayasan, sekretaris yayasan.

### b. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dari hasil penelitian perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Yayasan. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini

data didapat dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait pada Yayasan Darul Hikmah di Kabupaten Dharmasraya.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan Yayasan

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>4</sup> Bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Yayasan Darul Hikmah.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara berhadapan muka dengan Bapak Syawal selaku organ pengurus Yayasan Darul Hikmah. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar pedoman wawancara.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006, Hal. 33



## 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif yaitu data yang didapat tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistik tetapi analisis data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan juga termasuk pengalaman peneliti sendiri sehingga menggambarkan hasil penelitian.

### F. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang yayasan secara umum yang meliputi pengertian, tujuan yayasan, pengaturan yayasan, pendirian yayasan, organ yayasan.

#### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan memberikan gambaran ringkasan tentang peranan pengurus terhadap perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten

Dharmasraya dan kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah di kabupaten Dharmasraya.

#### BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan mulai dari bab I sampai Bab IV serta memuat saran yang berguna untuk menghadapi masalah yang timbul.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan Badan Hukum**

###### **a. Pengertian Badan Hukum menurut Para ahli**

Untuk menambah dan memperkaya pemahaman tentang badan hukum, maka dapat dipaparkan beberapa pengertian badan hukum menurut para ahli diantaranya:<sup>5</sup>

1) Utrecht

Badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat untuk bukan manusia.

2) Meijer

Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.

3) Logemann

Badan hukum adalah suatu personifikasi yaitu suatu perwujudan hak-kewajiban, hukum organisasi menentukan dari personifikasi itu.

4) R.Subekti

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia,

---

<sup>5</sup> Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 18



serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

5) R. Rochmat Soemitro

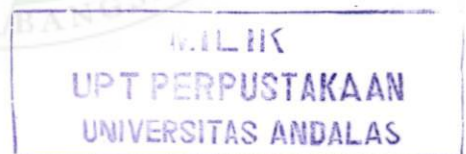
Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

6) Wirjono Prodjodikoro

Badan hukum yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain/ badan lain.

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang berhubungan dengan kekayaan tersebut.<sup>6</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:<sup>7</sup>

1. Perkumpulan orang (organisasi).
2. Dapat melakukann perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
4. Mempunyai pengurus.
5. Mempunyai hak dan kewajiban.
6. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.



---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17

<sup>7</sup> Chidir Ali, *op.cit*, hlm. 21.

## b. Pengaturan badan hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait badan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:<sup>8</sup>

1. Peraturan perundang-undangan tentang badan hukum yang tunduk pada hukum perdata menurut KUHPerdata (B.W. Indonesia):

- a. Bab IX Buku III KUHPerdata dimulai dari pasal 1653 yang mengatur tentang *zedelijke lichamen* yaitu badan-badan susila dan sekarang disebut badan hukum.
- b. Stb 1870 No. 64: *Rechtspersoonlijkheid van verenigingen* ( kepribadian hukum dari perkumpulan artinya badan hukum itu mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum)
- c. Stb 1927 No. 156, *Regeling van de rechtspositie der kerkgenootschappen*.
- d. Bab III bagian 3 KUH Dagang (W.v. K) menurut Stb 1938 No. 276 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Pasal 286 KUH Dagang, tentang Perusahaan Asuransi yang merupakan badan hukum.
- f. Stb. 1926 No. 377, tentang Dana Buruh

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum yang tunduk baik pada hukum adat maupun KUHPerdata (B.W. Indonesia):

- a. Stb 1939 No. 569, *Ordonantie op de inlandsche maatshapij op de aandelen* ( tentang INA)
- b. Stb 1939 No. 570, *Ordonantie od de inlandsche vereniging* ( tentang perhimpunan bumiputera)

---

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 22.

- c. Stb 1939 No. 571, *Ordonantie of de gerechtelijke vereffening van inlandsche rechtspersonen*.

## 2. Penggolongan Badan Hukum

Aneka badan hukum di Indonesia dapat dikelompokkan yaitu:<sup>9</sup>

### a. Pembagian Badan Hukum Menurut Macam-macamnya

Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu:

#### 1) Badan Hukum Orisinil (Murni-asli)

Yaitu Negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

#### 2) Badan Hukum yang tidak orisinil

Badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara menegaskan:

Selanjutnya perseroan yang sejati (*eigenlijke naatschap*) oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan yang baik.

---

<sup>9</sup> Chidir Ali, op .cit, hlm. 55-64



b. Pembagian Badan Hukum menurut Jenis-Jenisnya

Menurut jenisnya Badan Hukum dapat dibagi menjadi:

1) Badan Hukum Publik

Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik yakni Negara, dalam bertindak dalam lapangan hukum perdata. Hal ini merupakan persoalan yang masih harus ditentukan apakah berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Perdata.

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum orisinil, perlu diingat bahwa:

- a) Negara Republik Indonesia adalah badan hukum publik dan merupakan Negara itu bukan karena diadakan (*ingesteld*) berdasar Pasal 1653 KUHPerdata.
- b) Juga Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum itu bukan pula karena penyerahan kedaulatan tanggal 27 desember 1949, hukum itu sejalan berdiri sendiri dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

2) Badan hukum perdata

Dalam badan hukum keperdataan ialah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a) Perkumpulan (*verniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, stb. 1870-64 dan Stb, 1939-570.
- b) Perseroan terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 KUHDagang
- c) *Rederij* diatur dalam pasal 323 KUHDagang
- d) *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156

- e) Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi Nomor 12 Tahun 1967
- f) Yayasan, dan lain sebagainya.

c. Menurut sifatnya badan hukum dapat dibagi atas dua macam:

1) Korporasi

Badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masingnya.

2) Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagi kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil..

3. **Teori Badan Hukum**

Status hukum yayasan sebagai badan hukum dapat pula diketahui dari berbagai teori mengenai badan hukum. Dalam kaitan dengan badan hukum dapat dikemukakan teori-teori sebagai berikut;<sup>10</sup>

a. Teori fiksi

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu suatu fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu badan hukum yang dianggapnya sama dengan manusia.

---

<sup>10</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm 59

b. Teori organ

Sebagai reaksi atau lawan dari teori fiksi menimbulkan ajaran yang disebut teori realitas. Ajaran ini kemudian lebih dikenal dengan nama teori orgaan. Menurut ajaran ini, badan hukum itu merupakan suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia di dalam pergaulan hukum. Badan hukum ini mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui perantaraan alat-alat perlengkapan (organnya) seperti pengurus atau anggota- anggotanya. Kehendak dari badan hukum identik dengan kehendak atau kemauan dari pengurus atau anggota. Teori ini sekaligus menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dan badan hukum.

c. Teori kenyataan yuridis

Teori kenyataan yuridis merupakan penyempitan dari teori organ, menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realita, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini juga disebut teori kenyataan yang sederhana. Sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, seperti halnya dengan manusia.

d. Teori kekayaan kolektif

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Dengan kata



lain, bahwa orang-orang yang berhimpunan itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum adalah sesuatu yang abstrak.

e. Teori kekayaan bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada badan hukum pada hakikatnya hak-hak tanpa subjek hukum. Namun tidak dapat disangkal adanya hak-hak atas kekayaan, sedangkan tidak ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak itu, berarti kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. jadi hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Di sini yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu tanpa peduli siapakah badan hukum itu apakah manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak-hak normal atau tidak.

f. Teori tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya

Menurut ajaran ini, tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya kehendak, tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum, ini merupakan kensekuensi terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum, yang berkehendak adalah para pengurus, maka pada badan hukum itu semua hak itu diliputi oleh pengurus.

g. *Teori leon duguit*

Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum itu. Di samping itu, Duguit menegaskan pula bahwa hanya manusia dapat menjadi subjek hukum tanpa menjadi pendukung hak. Oleh karena itu duguit hanya menerima manusia sebagai subjek hukum, maka baginyajuga hanya manusia menjadi subjek hukum Internasional.

#### 4. Syarat- syarat Badan Hukum

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan hukum itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum. Syarat-syarat badan hukum tersebut dihubungkan dengan sumber hukum yang formal yaitu :<sup>11</sup>

a. Syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.

Persyaratan badan hukum sebagai diminta oleh peraturan perundangan yaitu dengan dua jalan suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan berpedoman pada Pasal 1653 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.
- 2) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum.

---

<sup>11</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, Hlm80



b. Syarat- syarat yang diminta oleh kebiasaan dan yurisprudensi.

Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal. Sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Di Indonesia, walaupun undang-undang belum mengatur tentang sewa-beli dan jaminan fiducia, tetapi dalam praktek karena merupakan kebutuhan masyarakat kedua lembaga tersebut bukan hal yang asing bagi masyarakat. Praktek sewa-beli dan jaminan fiducia tersebut merupakan kebiasaan sebagai nilai-nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya. Demikian juga dengan yayasan misalnya, walaupun di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkuat eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum, sebagai suatu badan hukum.

c. Syarat-syarat badan hukum menurut teori Meyers :<sup>12</sup>

- 1) Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- 2) Ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan bukan kepentingan seseorang atau beberapa orang saja;
- 3) Kepentingan itu harus stabil untuk jangka waktu yang panjang;
- 3) Kekayaan itu harus dapat memelihara kepentingan tersebut.

## 5. Berakhirnya Badan Hukum

Badan hukum berakhir karena :<sup>13</sup>

- a. Keputusan Rapat Umum Anggota;
- b. Jangka waktu berakhir;

---

<sup>12</sup> [elib.unikom.ac.id/download.php?id=48694](http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=48694). Diakses Tanggal 13 Oktober 2011

<sup>13</sup> [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id). Diakses Tanggal 14 Oktober 2011



- c. Tujuan badan hukum telah atau tidak tercapai;
- d. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Usulan pembubaran diajukan kepada Rapat Umum Anggota oleh anggota badan hukum paling sedikit 1/10 jumlah seluruh anggota badan hukum dengan hak suara, dan
- f. Lebih dari setengah jumlah anggota badan pengurus dan atau badan pengawas.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan**

### **1. Pengertian yayasan**

Istilah Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam bahasa belanda dan “*foundation*” dalam bahasa inggris. *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas, tidak mempunyai anggota atau pesero, oleh karena apa yang hal *stichting* dianggap badan hukum adalah sejumlah kekayaan berupa uang dan lain- lain benda kekayaan.

Beberapa defenisi tentang Yayasan menurut para ahli sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### **1. Chidir Ali**

Yayasan adalah dipisahkannya suatu harta kekayaan tertentu, diadakan suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah, yaitu harta yang diberi tujuan yang dipisahkan oleh seorang manusia.

#### **2. Paul Scholten**

Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

suatu tujuan tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.

3. N. H. Bregstein

Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagi kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil.

4. W. L. G. Lemaire

Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

5. Meijers

Pada yayasan pokoknya terdapat, yaitu:

- a. Penetapan tujuan dan organisasi para pendirinya;
- b. Tidak ada organisasi anggota;
- c. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berkaitan jauh dalam tujuan organisasi;
- d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.

6. A. Pitlo

Sebagaimana hal untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama

harus ada maksud untuk mendirikan yayasan, selanjutnya perbuatan hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat materil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal, yakni surat. Yayasan adalah badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya pengusaha/pemerintah.

7. I. G. Rai Widjaya

Yayasan adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil.

8. Chatamarrasjid Ais

Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersil maupun yang secara tidak langsung bersifat komersil.

9. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan definisi yayasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu yayasan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Yayasan adalah badan hukum

Disini jelas bahwa undang-undang yayasan menganut sistem tertutup dalam penentuan status hukum suatu organisasi. Yayasan diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal enty*. Oleh karena



maka disebut *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *recht person*.<sup>15</sup>

b. Terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan

Dalam unsur ini yayasan dikatakan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dikatakan bahwa yayasan dijabarkan secara nyata bahwa kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.

c. Diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan.

Bertujuan sosial yang meliputi mendirikan tempat ibadah, rumah yatim piatu, mendirikan rumah pendirian orang lanjut usia, mendirikan sekolah orang lemah mental, pendidikan formal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai kepada perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan perlindungan konsumen dan juga kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Dalam bidang keagamaan meliputi mendirikan tempat ibadah, pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infak dan sodaqoh serta kegiatan usaha lainnya.

---

<sup>15</sup> Gunawan Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, mega point, Jakarta, Hlm 127

- d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yayasan menurut pendapat yang lazim dianut memang tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin sekelompok orang yang memperoleh manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, seperti halnya dengan yayasan yang memberikan beasiswa kepada para mahasiswa atau orang jompo yang diberi santunan tiap bulannya.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Yayasan

Pada umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh satu orang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. Tujuan tertentu merupakan syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Pendiri yayasan tidak diperbolehkan perbuatan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan. Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan umum.<sup>17</sup>

Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya, dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan tersebut dapat bersifat kumulatif

---

<sup>16</sup> H. Budi Untung DKK, 2002. *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta.

<sup>17</sup> Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 87



(mencakup semua) atau bersifat opsional (pilihan-pilihan saja) kegiatan tersebut sebagai berikut yaitu :<sup>18</sup>

a. Bidang Sosial

Dalam bidang sosial antara lain dibidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan tingkat kanak-kanak sampai kepada pendidikan tingkat perguruan tinggi, kesenian, olah raga, kesenian dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha yang terkait.

b. Bidang Agama

Dalam bidang keagamaan yang meliputi: mendirikan rumah ibadah (mesjid, wihara, klenteng atau gereja), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infak dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

c. Bidang Kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

### 3. Pengaturan Yayasan

a. Yayasan di Masa Lalu

Yayasan dimasa lalu belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya, mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian, pada masa itu yayasan dikehendaki berstatus badan hukum. Putusan- putusan pengadilan yang menjadi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 6



yurisprudensi mengenai yayasan merupakan penetapan aturan yayasan, dalam hal ini yurisprudensi mengisi kekosongan hukum.

Di negara Indonesia, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124 K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *judex factie*, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*stichting pensiunfonds H.M.B. Indonesia* “ dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggota.
- 2) Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B
- 3) Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan.
- 4) Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Putusan Mahkamah Agung itu merupakan suatu kenyataan di dalam praktik yang menyangkut status badan hukum suatu yayasan yang mempengaruhi perilakunya dalam berhubungan dengan pihak lain.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka dari sisi undang-undang, jelas tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan secara tegas, bahwa yayasan adalah badan hukum, tetapi beberapa peraturan perundang-undangan secara tidak tegas mengakui bahwa yayasan adalah badan hukum, contoh dalam Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur tentang penghukuman terhadap badan hukum yayasan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria pada Pasal 21 Ayat (2) dan

Pasal 49 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tanah. Undang-undang kepailitan telah menyejajarkan yayasan sebagai badan hukum yang dapat dijatuhkan putusan pailit, asal saja sebagai debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar.

**b. Pengaturan Yayasan Saat Ini**

Yayasan diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001. Diundangkan undang-undang dimaksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini belum mampu menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terdapat beberapa substansi dari undang- undang tentang Yayasan ini yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketertiban hukum, untuk itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 oktober 2005.

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 9



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

#### **4. Pendirian Yayasan**

##### **a. Sebelum Berlakunya Undang- Undang Yayasan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum, hal ini berkaitan dengan sumber hukum yang formal. Tentang syarat badan hukum yang dikaji dari sumber hukum formal memberikan beberapa kemungkinan, bahwa badan hukum tersebut telah memenuhi:<sup>20</sup>

##### **1) Syarat berdasarkan ketentuan perundang- undangan**

Syarat- syarat berdasarkan undang-undang mendasarkan diri pada ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan adanya 2 ( dua) cara yaitu :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 23



- a) Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan hukum.
- b) Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. Oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik kesimpulan, bahwa badan itu adalah badan hukum.

Badan hukum dengan konstruksi keperdataan yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata itu meliputi semua perkumpulan swasta yang menurut Stb. 1870-64 dianggap sebagai badan hukum dan untuk itu diperlukan pengesahan aktanya dengan meninjau atas tujuan, asas lapangan kerja dan aturan-aturan lainnya dari perkumpulan tersebut. Pengesahan itu merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh perkumpulan yang berbadan hukum. Jadi untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan pemerintah. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia dicapai suatu pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengesahan sebagai badan hukum dari menteri kehakiman adalah syarat mutlak bagi berdirinya suatu Perseroan terbatas. (Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 224/1950/Perdata- tertanggal 17 Maret 1951).

## 2) Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi

Kebiasaan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, maka diusahakan untuk mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Berdasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, maka suatu badan dikatakan ada bilamana telah memiliki syarat sebagai berikut;

- a) Harus terdapat pemisahan kekayaan;
- b) Penunjukan suatu tujuan tertentu;
- c) Penunjukan suatu organisasi tertentu.

Walaupun sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus pada waktu itu, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi memperkuat eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum sebagai suatu badan hukum.

Berdasarkan pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, maka suatu badan dikatakan sebagai badan hukum, bilamana telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Syarat- syarat materiil yang terdiri atas:
  - 1. Harus ada suatu pemisahan kekayaan;
  - 2. Suatu tujuan;
  - 3. Suatu organisasi.
- b. Syarat formal

Syarat formal yaitu pendirian yayasan dalam wujud akta otentik, dalam pengesahan yayasan dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

### 3) Syarat berdasarkan pandangan doktrin

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan/atau perkumpulan itu adalah badan hukum, di kalangan para ahli/doktrin berpendapat sebagai berikut:

a. Menurut Meijers

Untuk dapat dikatakan ada suatu badan hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Terkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu, dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang tertentu. Dengan kata lain, bahwa terdapat harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya.
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja.
3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
4. Harus dapat ditunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan, tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terpisah dari kepentingan anggotanya.

b. Menurut Sri Soedewi Masychun Sofwan bahwa, status badan sebagai badan hukum dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu yaitu:

1. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud perhimpunan;
2. Kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan tertentu.



c. Menurut Ali Rido

Untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, sesuatu perkumpulan/ perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu.
3. Mempunyai kepentingan sendiri.
4. Adanya organisasi yang teratur.

d. Menurut Soeroso

Menurut Soeroso suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh badan hukum, yaitu;

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

**b. Setelah Berlaku Undang-Undang Yayasan**

1) Yayasan didirikan oleh satu orang

Suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Ketentuan ini menunjukkan, pendirian yayasan tidak dengan dasar adanya suatu perjanjian. Pendirian yayasan dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya bertujuan untuk status yayasan sebagai badan hukum yang

harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan yayasan digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

## 2) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat

Selain pendirian yayasan dilakukan dengan kehendak seseorang, dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga diatur tentang pendirian yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat. Peraturan tentang surat wasiat belum ada undang-undang yang mengatur tentang surat wasiat, peraturan tertulis surat wasiat masih diatur di dalam Buku Kedua Bab Ketiga belas KUH Perdata.

Surat wasiat menurut Pasal 875 Ayat (1) KUH Perdata adalah suatu akta yang menurut pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dinyatakan, dapat dicabut lagi oleh pembuatnya. Surat wasiat wajib dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pembuatnya meninggal dunia.

## 3) Akta pendirian dengan akta notaris

Pendirian suatu yayasan harus dilakukan dengan pembuatan akta pendirian berupa akta notaris dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Pembuatan akta pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, seperti; nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri.

Akta notaris adalah akta otentik, karena dari segi pembuatannya dilakukan oleh notaris atau dihadapan notaris, dan akta tersebut dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu yang sekurang- kurangnya memuat :

- a) Nama dan tempat kedudukan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut;
- c) Jangka waktu pendirian;
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi, pendiri dalam bentuk uang dan benda;
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- h) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- i) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar.

4) Mengajukan permohonan pengesahan ke menteri melalui notaris

Pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM bertujuan untuk kepentingan yayasan supaya memperoleh status badan hukum. Dalam memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan,



menteri dapat meminta instansi yang terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan disampaikan ke instansi terkait.

5) Tanggung jawab pengurus sebelum pengesahan

Menurut Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

6) Pengumuman dalam berita negara tanpa permohonan

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Maksud dan tujuan pengumuman itu, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan pengumuman dimaksud dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung

sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui atau diterima oleh Menteri.

7) Tanggung jawab pengurus sebelum pengumuman

Dalam perseroan terbatas mengatur selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perbuatan hukum yang dilakukan persero. Pada yayasan ternyata tidak ada undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab pengurus, disebabkan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sekarang bukan kewajiban pengurus yayasan melainkan kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

## 5. Organ Yayasan

### a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut yayasan. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan pengertian bahwa Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atau Anggaran Dasar.

Pembina merupakan organ tertinggi, dibanding dengan alat perlengkapan lainnya yaitu pengurus dan pengawas. Pembina ditunjuk berdasarkan pengangkatan, yang dilakukan dengan berdasarkan rapat anggota Pembina. Menjadi anggota suatu yayasan tidak dilakukan pemilihan tetapi pengangkatan. Pengangkatan anggota pembina dilakukan dengan berdasarkan rapat anggota Pembina. Dalam hal siapa yang dapat diangkat menjadi anggota pembina diisyaratkan oleh Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Yayasan adalah



orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dalam alat perlengkapan Pembina ini dapat terjadi kemungkinan suatu saat tidak ada anggotanya atau mengalami kekosongan anggota pembina. Maka dapat diatasi dengan ketentuan pada Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Kewenangan Pembina terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, meliputi :

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Sebagai organ dalam yayasan, setiap anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas. Larangan ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Anggota pembina juga dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan itu sendiri. Larangan



merangkap jabatan ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan tugas yang wajib dilaksanakan seorang personel dengan peran yang berbeda dalam saat yang bersamaan. Larangan merangkap sebagai pembina mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Keadaan itu akan mempengaruhi yayasan tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya.

b. Pengurus

Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan pengurusan baik di dalam dan di luar yayasan. Pengurus menjalankan roda yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Dalam Undang-Undang Yayasan tidak banyak menetapkan mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi pengurus yayasan. Undang-Undang Yayasan cukup memberikan satu syarat saja, ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.<sup>21</sup>

Untuk menjadi pengurus seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Orang perorangan;
- 2) Mampu melakukan perbuatan hukum;
- 3) Bukan pembina atau pengawas yayasan tersebut;
- 4) Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan negara

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm. 83

<sup>22</sup> Anwar borahima, Anwar Borahima, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm . 214

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 5) Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur di dalam anggaran dasar;
- 6) Anggota pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia;
- 7) Anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara.

Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindihnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Seorang ketua;
- 2) Seorang sekretaris; dan
- 3) Seorang bendahara.

Pengurus memiliki beberapa kewenangan meliputi :

- 1) Melaksanakan kepengurusan yayasan;
- 2) Mewakili yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan;

- 3) Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara;
- 4) Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu;
- 5) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.

Undang-Undang Yayasan juga memberikan pembatasan-pembatasan yang menyangkut mengenai wewenang pengurus. Dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan membatasi perbuatan pengurus yayasan, dengan menyatakan bahwa pengurus tidak berwenang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Mengikat yayasan sebagai penjamin utang,
- 2) Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, atau
- 3) Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan lain.

Pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Wajib mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara, setelah akta pendirian atau perubahannya dilaksanakan.
- 2) Wajib menjaga kerahasiaan mengenai informasi yang tidak dapat diketahui umum.
- 3) Wajib bersama-sama dengan pengawas mengangkat pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
- 4) Wajib menyampaikan kepada salah satu organ yayasan apabila hendak melakukan perbuatan hukum yang mempunyai perbedaan kepentingan dengan maksud dan tujuan yayasan, jika diduga atau patut diduga perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 223



- 5) Wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.
  - 6) Wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
  - 7) Wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5(lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup.
  - 8) wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan pengadilan.
- c. Pengawas

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan memberikan pengertian bahwa pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawas serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Syarat untuk diangkat menjadi pengawas adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Orang perorangan;
- 2) Mampu melakukan perbuatan hukum;
- 3) Tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus;
- 4) Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5) Anggota pengawas yayasan yang berkewarganegaraan asing jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin sementara.

---

<sup>24</sup> Anwar borahima, *Kedudukan yayasan di Indonesia*, Prenada media, Jakarta, hlm. 216

Kewenangan pengawas sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
- 2) Memberhentikan sementara anggota pengurus;
- 3) Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus.

Masa jabatan pengawas sama dengan masa jabatan pengurus yaitu lima tahun. Setelah masa jabatan itu selesai, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Dalam masa jabatannya pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian yang dilakukan oleh pengawas tidak boleh dilaksanakan dengan sewenang-wenang, tetapi harus ada landasan hukumnya. Alasannya harus jelas dan dapat menunjuk peraturan mana yang dilanggar oleh anggota pengurus, misalnya melanggar ketentuan anggaran dasar.

Pengawas juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu, untuk pengawas yang melakukan kesalahan didalam menjalankan tugasnya, tidak dikenal adanya pemberhentian sementara, melainkan pemberhentian yang bersifat final. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pembina melalui keputusan dalam suatu rapat. Pemberhentian tersebut dilakukan pembina setelah memperhatikan pelaksanaan tugas pengawas yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar, sehingga akan merugikan yayasan. Sebaliknya jika pemberhentian itu dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar, pengadilan dapat membatalkan setelah pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan. Dalam pemberhentian pengawas harus

---

<sup>25</sup> *ibid.*Hlm. 226



dilakukan pengangkatan, agar organ ini dapat bekerja kembali dengan baik.

Maka pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada menteri.

## **6. Harta Kekayaan Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum, badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu adalah berdasarkan teori kekayaan bertujuan yang pada mulanya diajukan oleh A. Brinz. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada seorang manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada yayasan tujuan itu bersifat idealis, sosial dan kemanusiaan. Teori ini secara selintas mendukung pula pandangan bahwa yayasan adalah milik masyarakat.<sup>26</sup>

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara implisit memperhatikan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam pasal 68 Undang- Undnag Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
- (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud

---

<sup>26</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23



dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

Ketentuan di atas memperhatikan bahwa kekayaan yayasan adalah milik dari tujuan yayasan itu sendiri. Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pemilik yayasan adalah masyarakat dan bukan para pendiri/pembina, pengurus, dan atau pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan awal. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, yang diperoleh dari kegiatan usaha yayasan, kekayaan yayasan juga dapat diperoleh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah wasiat;
  - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan baik dari negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta yang diwakafkan dapat berasal dari seseorang atau badan hukum. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. Hibah adalah hibah dari orang atau dari badan hukum. Mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Perolehan lain yang diterima yayasan dapat berupa deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan oleh yayasan atau hasil penyertaan yayasan pada suatu badan hukum.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan. Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Keuangan yayasan biasanya diperoleh dari para donatur atau sumbangan yang tidak mengikat dari para dermawan. Keuangan awal diperoleh dari pendiri atau orang yang memprakarsai didirikannya yayasan dan biasanya juga duduk sebagai ketua yayasan. Dana dari donatur atau sumbangan dari dermawan merupakan modal awal yang dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pengurus yayasan. Dana atau sumbangan yang tidak mengikat ini tidak kembali kepada pemiliknya.



Kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang menjadi organ yayasan harus bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana terlihat dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Penjelasan dari Pasal 3 Ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat propektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Propektif disini maksudnya adalah yang mungkin dapat memberikan keuntungan, maka yayasan



dapat melakukan semua kegiatan usaha seperti yang dilakukan oleh badan usaha lain. Hanya keuntungannya tidak dibagi atau diberi kepada pembina, pengurus dan pembina, tetapi harus dipergunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan ini sebenarnya juga membuka peluang bagi suatu kegiatan bisnis murni yang bertujuan mengejar laba, seperti dapat diperhatikan pada kegiatan pendidikan, kesehatan, olah raga.

Tidak adanya ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya mengemukakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Apabila kegiatan yang dilakukan yayasan tidak tercantum dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 atau diragukan bertujuan sosial dan kemanusiaan, keputusannya diserahkan kepada pengadilan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. kegiatan dengan tujuan mengejar laba haruslah tidak diperbolehkan memilih bentuk badan hukum yayasan, tetapi bentuk badan hukum lain yang tersedia untuk maksud mengejar laba seperti perseroan Terbatas. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan mendirikan suatu usaha baru, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.

Dalam melakukan kegiatan usaha yayasan tidak boleh menjadi badan hukum lain, seperti Perseroan Terbatas. Di sini berlaku idil, bahwa tiap bentuk badan hukum yang diciptakan mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada 1 (satu) bentuk badan hukum yang dapat mencakup tujuan dan struktur badan hukum lain.

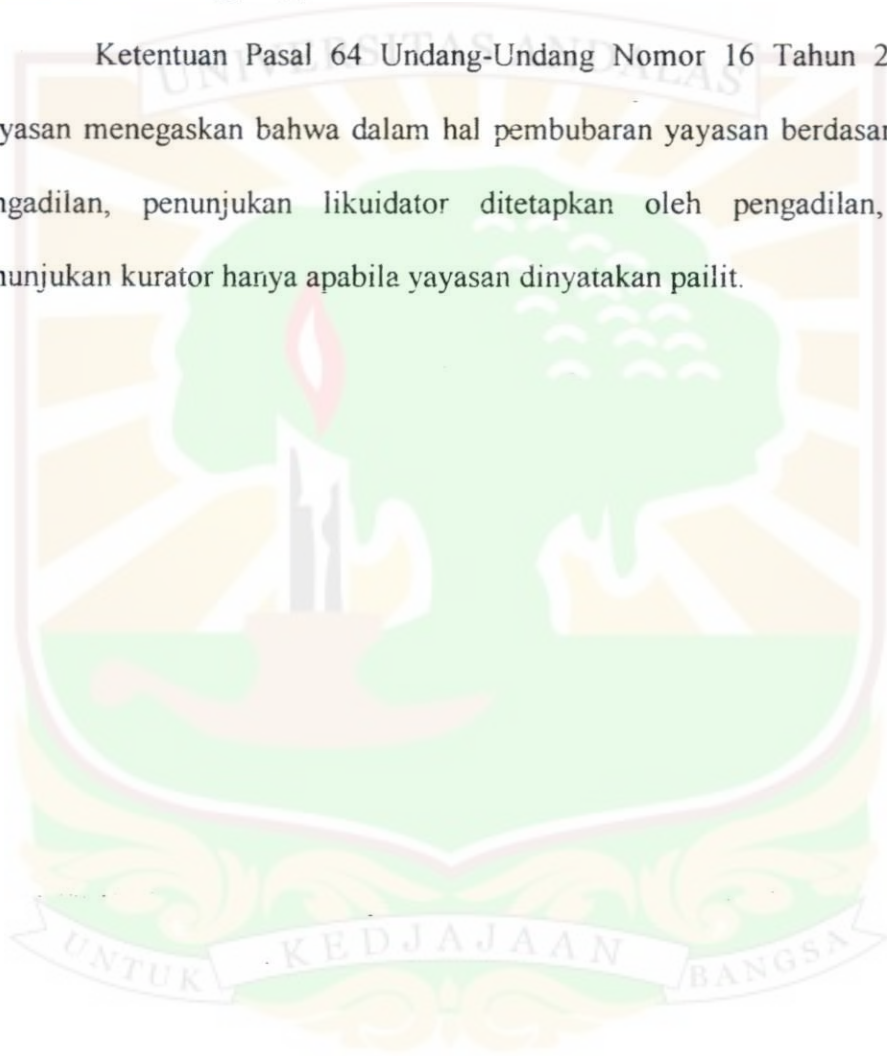
## **7. Pembubaran Yayasan**

Yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan telah atau tidak tercapai lagi, ataupun karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan ini didasarkan pada alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa kekayaan yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (dilikuidasi). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak secara likuidator. Likuidator atau kurator yang ditunjuk, melakukan pemberesan kekayaan

yayasan yang bubar atau dibubarkan. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Bila tidak, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya disesuaikan dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Dengan pembubaran tersebut, keberadaan yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa dalam hal pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila yayasan dinyatakan pailit.





### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya**

###### **1. Sejarah Berdirinya Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya**

Yayasan Darul Hikmah didirikan di Dharmasraya Sumatera Barat pada tanggal 20 Juli 1990. Yayasan Darul hikmah bergerak dibidang keagamaan yaitu menyelenggarakan Pondok pesantren dan madrasah lembaga formal dibidang pendidikan. Yayasan Darul Hikmah terletak di pinggir jalan Lintas Sumatera Km.2 Koto Baru kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah sebelumnya bernama Yayasan Pondok Pesantren Tasawiyah Tarbiyah Islamiah Koto Baru yang terbentuk berdasarkan kehendak 2(dua) orang santri laki-laki kepada Buya M. Tasah Dt Bondo Rajo. Pada tahun 1990, santri tersebut belajar di ruang Mushallah Darul Hikmah yang terletak di Desa Koto, Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kab. Dharmasraya, dengan metode pengajaran khalaqah dan khalafiyah yang dibantu dengan dua orang guru yaitu Syawal Yunus dan Mahatiyus.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah terbentuk pada tanggal 25 Nopember 1993 pada saat itu masih bernama Yayasan Pondok Pesantren Tasawiyah Tarbiyah Islamiah Koto Baru yang dibuat dihadapan Eldani S.H Notaris di Solok dengan SK Menteri Kehakiman Nomor C- 34. HT. 03.01 – Tahun 1993. Dihadiri para saksi;

- 1) Tuan Masri Datuk Rajo Selan
- 2) Tuan Arlis Usman
- 3) Tuan Mursyidin

#### 4) Tuan Syawal Yunus

Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Tasawiyah Tarbiyah Islamiah Koto Baru memisahkan harta kekayaan uang sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebidang tanah hak milik yang sudah bersertifikat seluas 21.330 M2 (duapuluh satu ribu tigaratus tigapuluh meter persegi). Dengan uang serta tanah tersebut pendiri bersama-sama mendirikan suatu yayasan.

Pada Tahun 1994 Yayasan Pondok Pesantren Tasawiyah Tarbiyah Islamiah Koto Baru mengganti nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Perubahan nama yayasan diresmikan dengan merubah anggaran dasar Yayasan pada tanggal 14 September 1994 di hadapan Notaris Eldani yang beralamat di jalan H. Ahmad Dahlan Nomor 149 Solok dengan SK Menteri Kehakiman Nomor C- 34. HT. 03.01- Tahun 1993. Perubahan nama dikarenakan nama awal yayasan Pondok Pesantren Tasawiyah Tarbiyah Islamiah identik dengan nama pendiri yayasan yaitu M. Tasah jadi untuk membuat yayasan ini menjadi umum maka dibuatkan nama yayasan yang lebih umum yaitu Pondok Pesantren Darul Hikmah.

## 2. Maksud dan Tujuan Yayasan

Berdasarkan anggaran dasar yayasan pondok pesantren Darul Hikmah dalam Pasal 3 Anggaran Dasar disebutkan bahwa maksud dan tujuan yayasan dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan dasar negara serta bergerak dibidang sosial dan pendidikan. Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan suatu lembaga pendidikan agama islam yang dikelola dalam suatu pesantren yang berguna bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Sumatra Barat khususnya. Ikut berpartisipasi



dalam pembangunan Bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan maksud dan tujuan yayasan, maka yayasan memiliki fungsi dan tugas antara lain :

- 1) Mendidik untuk berperilaku, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Membekali anak didik memiliki ilmu dan wawasan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seimbang Imtaq (iman dan taqwa) dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi).
- 3) Mengembangkan bakat dan kemampuan siswa sesuai dengan profesi dan bakatnya melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler.
- 4) Memberikan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman.
- 5) Memberikan layanan yang prima pada siswa dan masyarakat yang berkepentingan.
- 6) Mengajarkan berbakti kepada orang tua, bertata krama pada masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya yayasan ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau yang diizinkan oleh yang berwajib atau berwenang antara lain :

- a. Membangun dan membuka suatu lembaga pendidikan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah ( Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) dan Madrasah Aliyah ( Sekolah Lanjut Tingkat Atas) sebagai wadah untuk membangun dan menghasilkan lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komperastif yang diandalkan oleh masyarakat. Memiliki



tujuan menghasilkan lulusan bidang pendidikan yang memiliki bekal dakwah yang benar dan tepat, dan meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya memelihara dan membangun aqidah islamiyah.

b. Perkebunan

Yayasan Darul Hikmah juga melakukan kegiatan dibidang perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang terletak disekitar komplek Yayasan Darul Hikmah. Hasil dari kelapa sawit tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh yayasan.

c. Perikanan

Perikanan yang dilakukan yayasan bertujuan mendidik para santri untuk bisa hidup mandiri. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler bagi yang berminat. Hasil panennya dapat dijual dan juga untuk dimakan bersama.

d. Peternakan

Yayasan Darul Hikmah juga mengelola beberapa ekor ternak, seperti : sapi, kambing, dan ayam yang berguna untuk pengetahuan tambahan bagi santri juga bisa sebagai usaha untuk penunjang yayasan.

Menjalankan fungsi dan tugasnya maka Yayasan Darul Hikmah mempunyai visi "Terpuji dalam berakhlak, sopan santun dalam bergaul, terampil dalam bekerja, tanggung jawab dalam berbuat dan bisa hidup mandiri".

### 3. Struktur Yayasan

Struktur Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah

Pelindung/Penasehat :

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya
3. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Koto Baru

#### 4. Wali Nagari Koto Baru

Badan Pendiiri :

1. Buya M.Tasah Dt. Bondo Rajo
2. Masri Dt. Rajo Selan

Badan Pengurus :

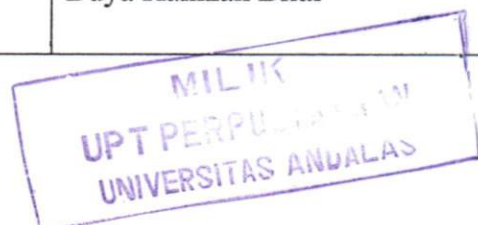
Ketua : Mursyiddin  
Wakil Ketua : Khairuddin SE.,MM  
Sekretaris : Syawal Yunus  
Wakil Sekretaris: Hasmyta  
Bendahara : Marhatiyus

Pemimpin Pembantu

Bidang Pendidikan : Drs. Kardinal  
Bidang Pembangunan : Hj. Habibah  
Bidang Keuangan : Hasnul Hadi S.E  
Bidang pembinaan bakat: Dra. Syafridar  
Bidang humas : Putra Elyusep

Dalam membantu jalannya program pendidikan demi kemajuan yayasan harus didukung oleh tenaga pendidik yang berpengalaman. Berikut nama-nama tenaga pendidik di Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah:

No	Nama Guru Umum	Nama Guru Agama/ Kitab Kuning
1.	Dra. Lastri Fayeni	Ustd. Syawal Yunus
2.	Murni Hidayah Subekti,S.Pd	Buya Hamzah Bilal



3.	Teguh Pramono, S.Pd	Ustd. Ahmad Darori, S.Pd
4.	Fitria Ningsih, S.Pd	Ustd. Abdul Halim
5.	Desniarti Herpika	Ustd. Zainal Efendi
6.	Susilawati S.Pd	Ustd. M. Raffi Hasroni
7.	Marsudi S.Pd	Ustd. Zalwit, S.Thi
8.	Wakini, S.Pd	Ustd. Yusri, S.Pd
9.	Eva Sulastris Ningsih, S.Pd	Ustd. M. Yunus
10.	Hj. Darnatius, S.Pd	Ustd. Subhan
11.	Indang Suslawati, S.Pd	Ustd. Andi, S.Iq
12.	Sukiyato, A.Md	Ustzah. Marhatiyus
13.	Yulia Ningsih, S.Pd	Ustzah. Eva Karmila, S.Pdi
14.	Yoza Oktaviana, S.Pd	Ustzah. Asmarni, A.Md
15.	Alna Arnita, S.Pd	Ustd. Bastanudin, S.Ag

Sumber : Profil Yayasan Dharul Hikmah Dharmasraya, 2011

Dalam stuktur yayasan, terdapat beberapa organ yang mempunyai peran dalam perkembangan yayasan tersebut. Dimana organ tersebut terdiri dari :

#### 1. Pembina

Pembina pada yayasan Darul Hikmah para pendiri yayasan yaitu Buya M.Tasah Dt. Bondo Rajo dan Masri Dt. Rajo Selan. Adanya organ pembina ini adalah untuk menghindari yayasan beralih dari tujuan semula didirikannya yayasan.



Pembina pada yayasan Darul Hikmah bertujuan untuk :

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas yayasan.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
- f. Pengesahan laporan Tahunan.

## 2. Pengurus

Dalam pendirian dan berjalannya kinerja yayasan, sangat diperlukan peran yang dominan dari pengurus yayasan itu sendiri. Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang menjalankan atau melaksanakan kepengurusan yayasan. Yayasan Darul Hikmah ini diurus dan dikemudikan oleh suatu badan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh badan pendiri. Pengurus yayasan ini bertugas untuk menjalankan fungsi yayasan sebagaimana yang telah ditetapkan pada tujuan awal pendirian yayasan tersebut.

Tugas dari pengurus tersebut antara lain;

- a) Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan, seperti tenaga pendidik.

Tenaga pendidik merupakan tenaga penunjang yang wajib ada untuk menjalankan kegiatan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.

Jadi dapat dikatakan tenaga pendidik merupakan organ yang mutlak ada di yayasan Darul Hikmah. Pengurus bertugas untuk mengawasi kinerja dari tim pendidik. Bertujuan untuk meningkatkan perkembangan bagi yayasan.

- b) Pengurus bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi.
- c) Pengurus wajib menyusun laporan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup.
- d) Pengurus bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan.

Keanggotaan badan pengurus berakhir karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Berhenti atas permintaan sendiri;
- c) Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan rapat badan pendiri, karena perbuatan-perbuatannya yang merugikan harta dan nama baik yayasan.

### 3. Pengawas

Pengawas Yayasan yang dinamakan pelindung atau penasehat oleh yayasan Darul Hikmah diangkat oleh para pendiri. Pengawas dari yayasan Darul Hikmah yaitu ;

- a. Bupati Kabupaten Dharmasraya
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya
- c. Musyawarah Pimpinan Kecamatan Koto Baru
- d. Wali Nagari Koto Baru

Badan pengawas Yayasan Darul Hikmah yaitu Bupati Kabupaten Dharmasraya, Kakadepag Kabupaten Dharmasraya, Camat Kecamatan Koto Baru, Wali Nagari Koto Baru. Bupati Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan yang tidak langsung ke Yayasan Darul Hikmah. Bupati Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan dari laporan pengawas lain sebagai

pembantu Bupati yaitu Kakadepag Kabupaten Dharmasraya, Camat Kecamatan Koto Baru, dan Wali Nagari Koto Baru.

Dewan pengawas berhak untuk mengawasi, meneliti keadaan Yayasan pada umumnya serta memberikan nasehat dan pendapat-pendapat kepada badan pengurus, dan teguran apabila terdapat penyimpangan yang terjadi pada yayasan Darul Hikmah.

#### **4. Kekayaan dan Pendapatan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya**

Kekayaan dan pendapatan Yayasan Darul Hikmah ini terdiri dari:

a. Kekayaan :

- 1) Kekayaan pangkal yang telah dipisahkan oleh para pendiri seperti tersebut dalam anggaran dasar berupa uang tunai sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2) Sebidang tanah hak milik yang sudah bersertifikat seluas 21.330 M<sup>2</sup> (duapuluh satu ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi).

b. Pendapatan :

- 1) Sumbangan, hibah, hibah wasiat, derma dan lain-lain dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
- 2) Bantuan dari pemerintah serta badan-badan lain, baik berupa subsidi yang berulang maupun yang diterima dengan sekaligus.
- 3) Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh dari usaha yayasan.

Usaha yayasan tentu akan menimbulkan sisa hasil usaha yayasan yang akan dibagikan menurut keputusan rapat badan pengurus pada waktu pengesahaan surat-surat tersebut.



## Kegiatan yayasan

Yayasan didirikan di atas sebuah visi yang kemudian dijabarkan menjadi sebuah misi yayasan. Dalam menjalankan dan mendapatkan tujuannya tersebut yayasan harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuannya tersebut. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang dimaksud dengan tujuan yayasan adalah bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan apa saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan- kegiatan pada yayasan Darul Hikmah antara lain :

- a. Melakukan proses pendidikan sesuai program untuk menjadikan para santri berilmu pengetahuan.

Pendidikan yang ada :

- 1) Kurikulum formal, yaitu ilmu pengetahuan umum yang juga ada di sekolah umum.
- 2) Kurikulum Pondok, yaitu kurikulum istimewa yang tidak terdapat di sekolah umum. Kurikulum ini juga bisa menjadi daya tarik para santri untuk bersekolah di yayasan Darul Hikmah.

Kurikulum Formal dan Kurikulum Pondok

Kurikulum Formal	Kurikulum Pondok
Bahasa Indonesia	Nahwa
Bahasa Inggris	Syaraf
Matematika	Fikih
Fisika	Tafsir Jalalen
Biologo	Akhlaqul Banin
PPKN	Tarikh

Ekonomi	Ushul Fiq
Geografi	Dardir
Sejarah	Tauhid
Teknologi Komputer	Hikam
Qur'an Hadist	Duraton Nasihin
Sejarah Kebudayaan Islam	Hadist
Aqidah Akhlak	Ilmu Tafsir
Fiqh Umum	
Bahasa Arab	

Sumber : Profil yayasan Darul Hikmah Dharmasraya, 2011

## **B. Peranan Pengurus Dalam Perkembangan Yayasan Darul Hikmah**

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan pada Yayasan Darul Hikmah mengenai fungsi dan peranan pengurus dalam yayasan sesuai dengan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan menjabarkan mengenai pelaksanaan fungsi dan peranan pengurus pada yayasan darul hikmah.

1. Fungsi pengurus sebagai mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan, seperti tenaga pendidik.

Tenaga pengajar pada yayasan Darul Hikmah pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang diangkat pada tahun 1993 sebanyak 4 (empat) orang, pada tahun 1996 diangkat sebanyak 5 (lima) orang, pada tahun 2000 sebanyak 10 (sepuluh) orang, pada Tahun 2004 sebanyak 6 (enam) orang, Pada Tahun 2007 penambahan pendidik sebanyak 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya bantuan dari pemerintah.

Sampai pada saat ini pengurus yayasan Darul Hikmah belum ada melakukan pemberhentian tenaga pengajar, hal ini dikarenakan kinerja

pendidik sampai saat ini memuaskan, dan belum adanya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Sampai pada tahun 2011 belum ada pemberhentian tenaga pendidik. Bahkan rencananya yayasan Darul Hikmah akan melakukan penambahan tenaga pendidik, dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Yayasan Darul Hikmah serta semakin meningkatnya jumlah santri pada Yayasan Darul Hikmah sesuai dengan data yang telah penulis jabarkan diatas.

2. Pengurus bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai fungsi pengurus yang bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi terlihat bahwa penyimpanan dokumen keuangan pada yayasan Darul Hikmah terdapat kekurangan hal ini dikarenakan data yang tersimpan pada yayasan Darul hikmah hanya ada dari tahun 2000 hingga 2011 saja. Pada tahun 1993 hingga 2000 tidak ditemukan lagi, karena kehilangan yang disebabkan kelalaian pengurus yang tidak bisa menyimpan dokumen sebaik mungkin. Sehingga pelaksanaan fungsi pengurus di bidang ini pada yayasan Darul Hikmah terdapat kekurangan.

3. Pengurus wajib menyusun laporan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup.

Dalam fungsi yayasan, pengurus wajib menyusun laporan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sesudah tahun buku yayasan ditutup sudah tersimpan dengan rapi yang dilaksanakan oleh bendahara yayasan yaitu Ibu Marhatiyus, hal ini terlihat dalam laporan



keuangan yang dilakukan oleh Yayasan Darul Hikmah pada Tahun 2011 (data terlampir).

4. Pengurus bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan.

Perkembangan yayasan atas kinerja pengurus dapat kita lihat dari :

b. Pembangunan yayasan

Pada awal pendirian yayasan Darul hikmah pada tahun 1994 memiliki 2 (dua) ruang belajar. Pada tahun 1997 pengurus yayasan menambah ruang belajar santri menjadi 5 (lima) ruang. Pada tahun 1999 pengurus membangun asrama putri dan putri untuk dijadikan tempat tinggal para santri. Masing-masing 1 (satu) petak. Pada tahun 2000 kembali ditambah pembangunan asrama menjadi 2 (dua) petak. Pada tahun 2003 ditambah pembangunan lokal 3 (tiga) petak ruang belajar. Kemudian pada tahun 2004 dilakukan penambahan asrama putra dan putri sehingga mencukupi untuk putra dan putri. Pada tahun 2006 dilakukan pembangunan 1 (satu) ruang perpustakaan dari bantuan pemerintah. Pada tahun 2011 sudah tampak 9 (sembilan) ruang belajar. 1 (satu) ruang perpustakaan, 1 (satu) ruang majlis guru, 4 (empat) unit asrama putra dan 4 (empat) unit asrama untuk santri putri, 1 (satu) mesjid, rumah tenaga pendidik, sarana olah raga seperti bola, takraw, voli.

c. Santri (siswa pondok pesantren)

Pada Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Dalam pasal ini bisa dilihat bahwa pengurus wajib menjalankan

tugas dengan itikad baik serta bertanggung jawab terhadap semua tindakan pengurus tersebut. Pada Yayasan Darul Hikmah, kinerja pengurus terlihat dari jumlah santri yang bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1994, jumlah santri hanya 14 orang sedangkan pada tahun 2009 jumlah santri mencapai 292 orang. Baiknya kinerja pengurus berdampak pada minat masyarakat terhadap kualitas pendidikan pada yayasan Darul Hikmah Dhamasraya.

Berikut kenaikan jumlah santri pada yayasan dari tahun 1994 sampai 2011 :

Tahun	Jumlah Santri
1994	14 Orang
1999	65 Orang
2004	245 Orang
2009	292 Orang
2011	322 Orang

Sumber : Laporan Tahunan Yayasan Darul Hikmah Tahun 2011

5. Kekuasaan badan pengurus dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan Darul Hikmah :

- a. Badan pengurus mewakili kepentingan-kepentingan Yayasan dalam artikata seluas-luasnya, mewakili Yayasan baik diluar maupun didalam Pengadilan untuk dan atas nama Yayasan, melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Badan Pengurus berhak untuk memindahkan kekuasaannya, baik sebagian maupun seluruhnya kepada seorang anggotanya ataupun lebih dan/atau kepada orang lain.

- c. Untuk maksud yang tersebut dalam sub 2) diatas, maka Badan Pengurus berhak untuk membuat kekuasaan umum ataupun kekuasaan khusus dan sewaktu-waktu dapat mencabutnya kembali.
  - d. Badan pengurus berkewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan mengatur serta mengurus segala sesuatu mengenai Yayasan dengan sebaik-baiknya.
6. Rapat badan pengurus berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan Darul Hikmah :
- a. Rapat badan pengurus diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan/atau setiap kali jika dianggap perlu oleh ketua atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Badan pengurus lainnya.  
Pengurus pada Yayasan Darul Hikmah melakukan Rapat badan pengurus setidaknya 1 (satu) kali setahun, jika dianggap perlu maka rapat badan pengurus dapat lebih dari 1(satu) kali setahun.
  - b. Rapat badan pengurus hanya sah jika dalam rapat itu hadir sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota badan pengurus yang akan mengambil segala keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
  - c. Setiap keputusan dalam rapat diambil dengan kesatuan pendapat dari para anggota Badan pengurus dan jika tidak ada kesatuan pendapat diantara para anggota badan pengurus, maka pendapat ketua-lah yang memutuskan setelah mengadakan musyawarah dengan badan pengawas.

Badan pengurus mempunyai peran yang sangat penting pada yayasan, dapat dilihat pada Yayasan Darul Hikmah peranan pengurus sangat berpengaruh terhadap perkembangan yayasan. Dari penjabaran penulis diatas peranan pengurus



yaitu pengurus harus mengangkat pelaksana kegiatan yang memiliki ilmu yang berkembang dibidangnya, organ pengurus juga harus melaksanakan penyimpanan dokumen keuangan dan administrasi lainnya secara baik. Pengurus bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan, tugas pengurus memperhatikan kecukupan pengajar dan pengajar yang memiliki ilmu yang berkembang. Kelengkapan sarana dan prasana dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan santri yang lebih aktif dan kreatif.

### **C. Kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya**

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan pada Yayasan Darul Hikmah mengenai kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan Yayasan Darul Hikmah, penulis menemukan beberapa kendala pengurus dalam meningkatkan perkembangan yayasan. Kendala pengurus pada Yayasan Darul Hikmah sebagai berikut :

#### **1) Kurangnya dana operasional**

Sumber pembiayaan untuk operasional sekolah masih dirasakan sangat kurang walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah namun dana tersebut belum dapat menutupi kekurangan dari kebutuhan operasional Yayasan.

#### **2) Penunggakan uang sekolah oleh santri**

Yayasan Darul Hikmah memberi kewajiban pada setiap santri untuk membayar uang sekolah mereka setiap semester, Uang sekolah ini digunakan untuk memberi gaji para guru. Santri di Yayasan Darul Hikmah tidak semuanya orang mampu, Maka ada sebagian dari santri tidak dapat membayar uang sekolah pada jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap jadwal pembayaran gaji guru.

### 3) Ketersediaan tempat pemondokan santri

Sistim pendidikan pondok pesantren sangat membutuhkan tersedianya sarana pemondokan untuk asrama para santri karena pondok pesantren itu sendiri identik dengan tempat pemondokan para santri sebagai bagian dari proses belajar dan mengajar para santri.

### 4) Ketersediaan ruang belajar

Ketersedian ruangan belajar yang representatif masih sangat dibutuhkan Yayasan Darul Hikmah untuk meningkatkan mutu pendidikannya, yang menginginkan para santri memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan.

### 5) Ketersedian ruang laboratorium

Tidak adanya ruang laboratorium sebagai tempat praktek dalam proses belajar para santri, baik untuk ruangan praktek jurusan bahasa maupun untuk ruangan praktek informatika serta ruang praktek jurusan Ilmu pengetahuan alam. Tidak ada laboratorium menyebabkan kurang maksimalnya penguasaan santri terhadap penguasaan bahasa, informatika, dan Ilmu pengetahuan alam.

### 6) Ketersediaan ruangan perpustakaan

Ruangan lain yang dibutuhkan Yayasan Darul Hikmah yaitu perpustakaan, dimana perpustakaan yang ada kurang memadai untuk menampung para santri dan masih sangat minimnya ketersediaan buku yang dibutuhkan oleh santri sehingga kurangnya minat para santri untuk mendatangi perpustakaan.

### 7) Ketersediaan sarana olahraga

Untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler para santri masih dirasa kurangnya ketersediaan sarana prasarana olahraga. Lapangan olah raga



yang bagus merupakan penunjang dalam kreatifitas santri dalam bidang keolahragaan dan dapat meningkatkan keinginan para santri untuk menjadi atlit.

#### 8) Ketersediaan tenaga pendidik

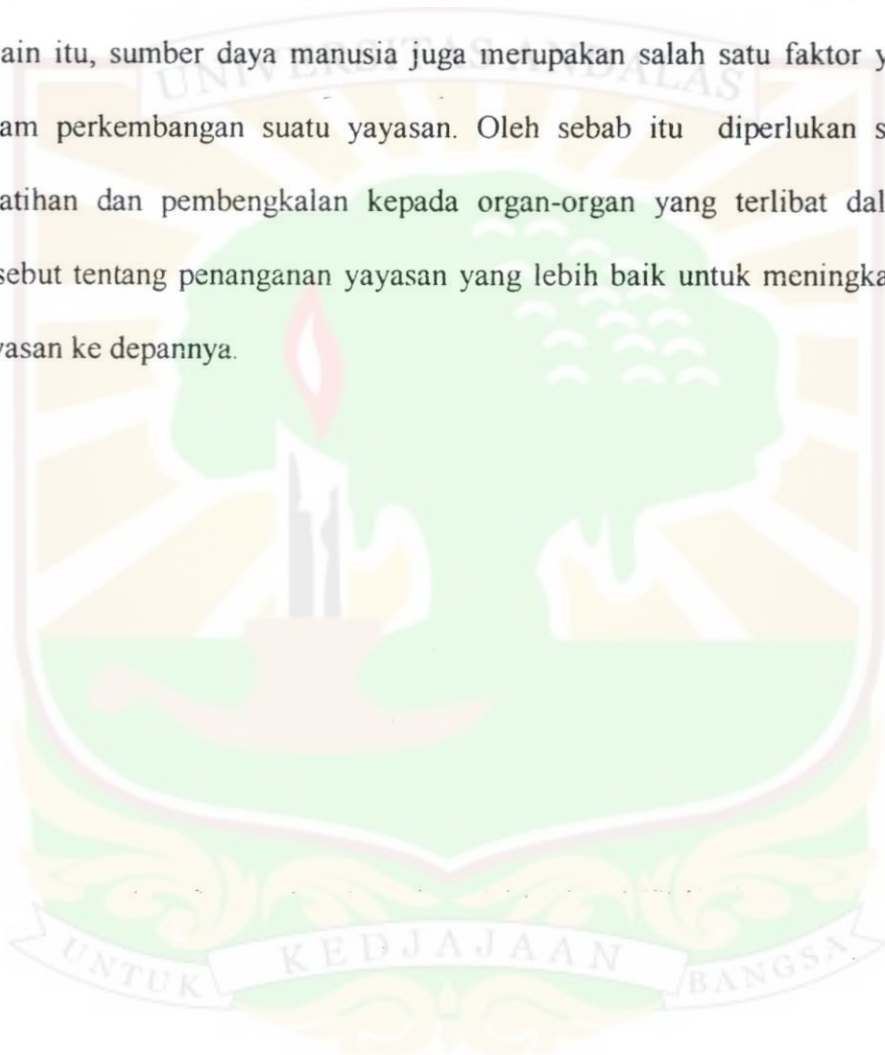
Pada Yayasan Darul Hikmah diberikan dua kurikulum yaitu formal dan pondok pesantren. Kurikulum formal yaitu pelajaran umum seperti sekolah umum lainnya di bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum. Kurikulum pondok yaitu yang memberikan pelajaran khusus agama islam. Dalam tenaga pendidik pada kurikulum pondok pesantren masih dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan kurang profesional, hal ini disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan dana untuk operasional guru ini. Dalam tenaga pendidik dibidang pelajaran umum masih dianggap kurang dan juga membutuhkan tenaga pendidik yang bermutu supaya bisa membawa ilmu-ilmu baru yang lebih berkembang kepada para santri, sehingga santri tidak ketinggalan ilmu pengetahuan dari para pelajar di sekolah umum lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat maka yayasan sangat membutuhkan pengajar yang profesional dibidangnya masing-masing.

#### 9) Perhatian pemerintah

Pemerintah kurang tanggap dan cepat menangani masalah yang ada pada yayasan, hal ini terkait dengan sistim pemerintahan itu sendiri. Bidang keagamaan merupakan urusan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk membantu sarana dan prasarana pondok pesantren.



Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Darul Hikmah, maka diperlukan solusi agar yayasan tersebut dapat berkembang dengan kinerja yang lebih baik. Oleh sebab itu diperlukan solusi yang tepat dimana pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih guna kelangsungan perkembangan yayasan tersebut, seperti memberikan dana yang lebih dan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk yayasan tersebut. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkembangan suatu yayasan. Oleh sebab itu diperlukan suatu bentuk pelatihan dan pembengkalan kepada organ-organ yang terlibat dalam yayasan tersebut tentang penanganan yayasan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja yayasan ke depannya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam

1. Peranan pengurus dalam perkembangan yayasan Darul Hikmah yaitu pengurus melakukan tugasnya :
  - a. Pengurus melakukan pengangkatan guru dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengangkatan guru dipilih guru yang lebih berpengalaman supaya santri lebih berwawasan dan pemberhentian guru dilakukan apabila guru tersebut mempunyai kinerja buruk melakukan fungsinya sebagai guru. Tapi sampai saat ini yayasan belum ada memberhentikan guru. Karena guru yang diangkat sudah disaring terlebih dahulu.
  - b. Pengurus bertugas menyimpan dokumen keuangan yayasan, yang disimpan oleh bendahara yayasan.
  - c. Pengurus bertugas memajukan yayasan dan memperhatikan keperluan dari sebuah yayasan. Untuk memajukan yayasan menerima guru pendidik yang berwawasan, memberikan ekstrakurikuler, dan pengurus juga memperhatikan keperluan seperti ruang belajar yang nyaman, lapangan olahraga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Tugas dan fungsi pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dapat dijalankan oleh pengurus pada yayasan Darul Hikmah dengan baik. Perkembangan yayasan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, seperti ruang belajar yang ditambah hingga

mencukupi untuk menampung santri, santri dari tahun ke tahun bertambah.

- d. Pengurus melakukan Rapat Badan Pengurus sekurang-kurangnya 2 kali setahun, dapat lebih jika dianggap perlu.

## 2. Kendala pengurus

Kendala yang dihadapi yayasan Darul Hikmah antara lain penunggakan uang sekolah bagi santri yang berpengaruh pada keuangan yayasan, hal ini berpengaruh pada jadwal pemberian gaji guru. Kendala yang lain yaitu kurangnya dana operasional sekolah, ketersediaan tempat pemondokan santri, ketersediaan ruang belajar, ketersediaan ruang laboratorium, ketersediaan sarana olah raga, ketersediaan tenaga pendidik, bantuan dari pemerintah. Pemerintah berperan cukup besar dalam perkembangan yayasan karena pemerintah yang dapat mengawasi kekurangan dari yayasan Darul Hikmah ini. Dalam segala hal pemerintah harus siap mengawasi yayasan seperti keuangan yayasan apakah sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, sarana prasarana untuk kelangsungan proses belajar mengajar di yayasan agar santri nyaman, menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas dan kreatif.

## B. Saran

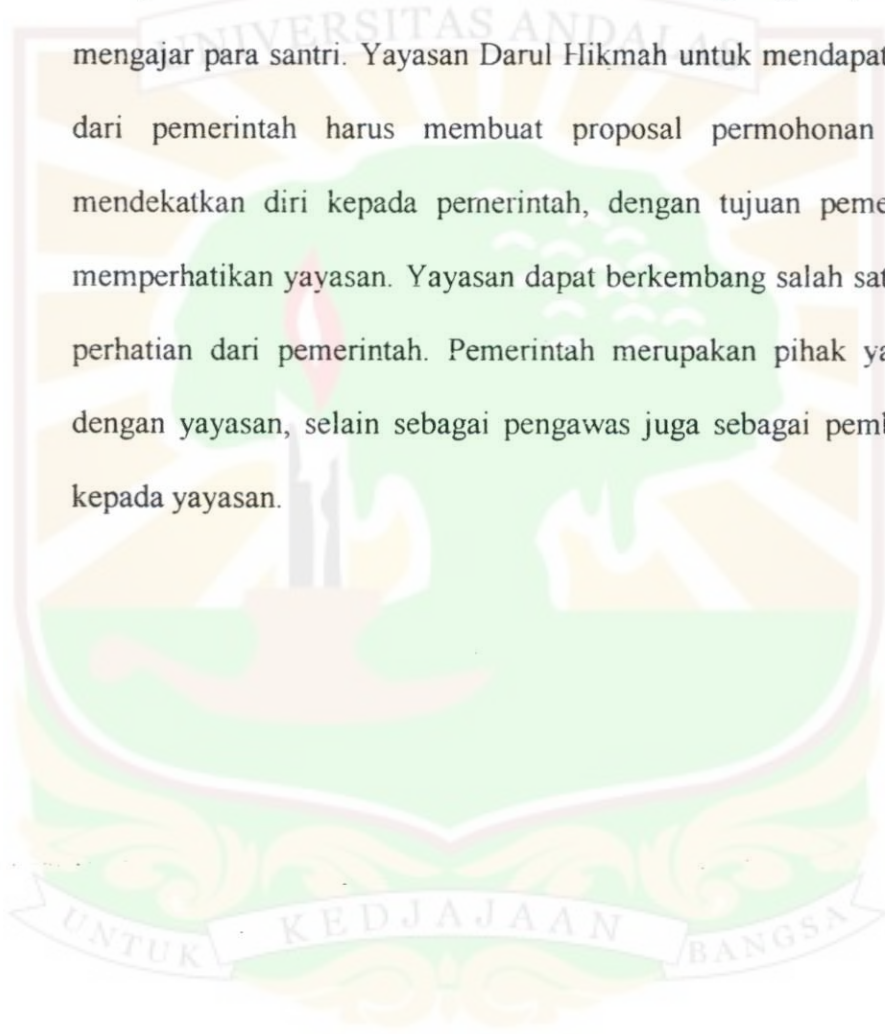
Dari permasalahan yang terdapat diatas maka penulis mempunyai beberapa saran:

1. Yayasan Darul Hikmah sebagai lembaga sosial murni, dimana organ yayasan tidak diberi gaji atau upah. Baik Pembina, Pengurus maupun Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela, ikhlas mengharap Keridho'an



ALLAH SWT. Diharapkan Pembina, Pengurus dan pengawas dapat bekerja sebagai mana mestinya.

2. Yayasan Darul Hikmah dalam menghadapi penunggakan uang sekolah bagi santri pengurus Yayasan Darul Hikmah semestinya membuat program pemberian bea siswa pada siswa tidak mampu dan berprestasi. Hal ini bertujuan untuk membantu santri demi kelangsungan proses belajar mengajar para santri. Yayasan Darul Hikmah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah harus membuat proposal permohonan dan harus mendekati diri kepada pemerintah, dengan tujuan pemerintah lebih memperhatikan yayasan. Yayasan dapat berkembang salah satunya karena perhatian dari pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang terdekat dengan yayasan, selain sebagai pengawas juga sebagai pemberi bantuan kepada yayasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, 2010, Pustaka Yestisia, Yogyakarta.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, 2010, Prenada Media, Jakarta

Budi Untung, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, 2002  
Yogyakarta.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, 2005, Alumni, Bandung.

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, 2008, rineka cipta. Jakarta.

Gunawan Wijaya, *Hukum Perusahaan*, 2000, Mega Point, Jakarta.

Nawawi, Hadari dan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, 1995, UGM Press, Yogyakarta

Rita M, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawa dan Pengurus Yayasan*. 2009,  
Penebar Swadaya. Jakarta.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 2003, Rineka Cipta,  
Jakarta.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kopersai, Yayasan, Wakaf*, 2004, P.T. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2005, UI Press. Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang  
Yayasan.

Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum  
Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

**C. Sumber Lain**

[www. Djpp. Depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

<http://id.wikipedia.org>







Nomor : 127/H.16.4/PP-2011  
Lamp. : -  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 14 Juni 2011

Kepada Yth:

1. Pimpinan Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

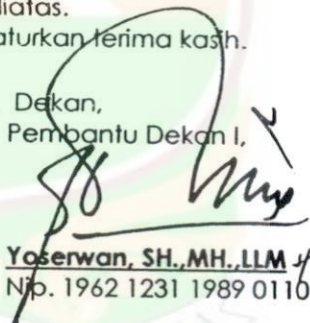
Nama	: Media Pan Kharsyi
No. BP	: 07140266
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl. M.Hatta No.3 Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (15 Juni – 15 September 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Di Kabupaten Dharmasraya

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

  
**Yoserwan, SH.,MH.,LLM**  
Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



# BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

## REKOMENDASI

No.B.070/12931/WAS-BKPL/2011

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 1272/H.16.4/PP-2011 tanggal 14 Juni Perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama : **MEDIA PAN KHARSYL**  
Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung / 26 Mei 1989  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Tunggang N0.3. Padang  
No.Kartu Identitas : 07140266  
Judul Penelitian : Peranan pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Di Kabupaten Dharmasraya  
Lokasi Tempat Penelitian : Kabupaten Dharmasraya  
Waktu Penelitian : 3 Bulan  
Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 16 Juni 2011

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS

PROPINSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN DHARMASRAYA



ELMAN SH

PEMBINA

Nip. 19560712 198610 1 001

### Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Dharmasraya Cq. Kantor Kesbangpol Dan Linmas di Pulau Punjung
4. Yang Bersangkutan





**MADRASAH TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN**  
**“ DARUL HIKMAH “**  
**TARBIYAH ISLAMIYAH KOTO BARU**  
**KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMAS RAYA**

ALAMAT : Jl.Lintas Sumatera Koto Baru Sitiung Km.2

Telp. (0754) 71296 – 71659 Kode Pos 27581

**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syawal Yunus

Jabatan : Pengurus Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya

Dengan ini menerangkan :

Nama : Media Pan Kharsyi

No. BP : 07140266

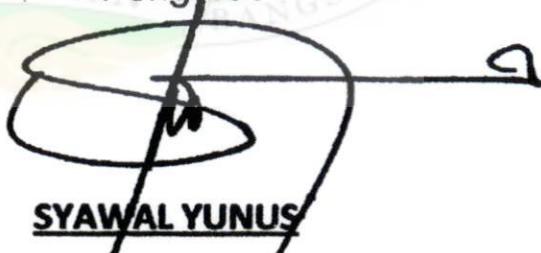
Jurusan/ fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Telah melakukan penelitian terkait judul “Peranan Pengurus Terhadap Perkembangan Yayasan Darul Hikmah Di Kabupaten Dharmasraya” di Yayasan Darul Hikmah Dharmasraya dari tanggal 25 Juni 2011 s/d 30 Juli 2011. Dalam bentuk kunjungan dan wawancara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, 30 Juli 2011

Pengurus



**SYAWAL YUNUS**





# PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH

KOTO BARU KEC. KOTO BARU KAB. DHARMASRAYA

## MENERIMA SISWA BARU

Tahun Pelajaran 2011 / 2012

*Marilah kita bentuk Putra-Putri kita dengan Dasar Ilmu Agama Pada Usia Dini & remaja dalam menghadapi Era Globalisasi*

### Visi dan Misi PONTREN

**Visi**  
Terpuji dalam berakhlak, sopan santun dalam bergaul, terampil dalam bekerja, tanggung jawab dalam berbuat dan bisa hidup mandiri.

**Misi**

- Mendidik untuk berperilaku, beriman, berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- Membekali anak didik memiliki ilmu dan wawasan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seimbang IMTAQ dan IPTEK.
- Mengembangkan bakat dan kemampuan siswa sesuai dengan profesi dan bakatnya melalui intra kurikuler dan ekstra kurikuler.
- Memberikan Ketrampilan sesuai dengan tuntutan zaman.
- Memberikan layanan yang prima pada siswa dan masyarakat yang berkepentingan.
- Mengajarkan berbakti kepada orang tua, bertata krama pada masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Barat Pepatah mengatakan :

*Kalau kita menanam Padi, rumput pasti akan tumbuh  
Kalau kita menanam rumput, Padi tidak akan tumbuh*

*Kalau di didik anak-anak kita dengan Ilmu Agama.  
Ilmu Pengetahuan Umum akan ikut.  
Kalau di didik anak-anak kita dengan dasar Ilmu Akhirat.  
Ilmu Dunia tetap akan ikut*

### Syarat-syarat Pendaftaran Pendidikan Formal

Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)

1. Lulusan SD/MIN/MIS dan SMP/MTs.
2. Mengisi Formulir yang telah tersedia
3. Menyerahkan Foto Copy Ijazah dan SKHU 2 Lbr.
4. Pas Foto Ukuran 3x4 dan 2x3 = 4 Lbr
5. Melampirkan Nomor Induk Nasional (NISN)
6. Map merah untuk Wanita Map hijau untuk Pria

### Syarat-syarat untuk Pondok Salafiyah

1. Tingkat 'Ula, hanya mengisi Formulir.
2. Tingkat Wustho, Tes Baca Alqur'an
3. Tingkat U'lya, Tes Baca Alqur'an dan Baca Kitab

### Tempat dan Waktu Pendaftaran

Jadwal Penerimaan Santriwan dan Santriwati Baru

- Dari Tanggal 15 Juni 2011 s/d 20 Juli 2011
- Komplek Pondok Pesantren " Darul Hikmah " Koto Baru - Dharmasraya

### Kegiatan Ekstra Kurikuler

- Pembinaan Seni Baca Alqur'an
- Pembinaan Sholat Berjamaah
- Praktek Penyelenggaraan Mayat
- Praktek Da'wah dan Khutbah Jum'at
- Cerdas Cermat Agama dan Umum
- Kader Mubaligh dan Mubalighah
- Kesenian Qasidah dan Marawis
- Olahraga dan Kepramukaan
- Seni Bela Diri (Karate)
- Seni Kaligrafi
- Keterampilan Menjahit

### Fasilitas Kegiatan

- Tersedia Asrama Putra dan Putri
- Memiliki Perpustakaan
- Memiliki Sarana Komputer
- Memiliki Sarana Mejahit
- Memiliki Sarana Olahraga dan Kesenian
- Memiliki Sarana Ibadah
- Memiliki Ruang Kelas 10 Ruang
- Memiliki Sarana Kantin (Dapur Umum)
- Memiliki Kolam Perikanan
- Memiliki Penjagaan Keamanan
- Memiliki Sumber Air Bersih

### Kurikulum Formal

1. BAHASA INDONESIA
2. BAHASA INGGRIS
3. MATEMATIKA
4. FISIKA
5. BIOLOGI
6. PPKN
7. EKONOMI
8. GEOGRAFI
9. SEJARAH
10. TEKNOLOGI KOMPUTER
11. QUR'AN HADIST
12. SKI
13. AQIDAH AKHLAK
14. FIQIH UMUM
15. BAHASA ARAB

### Kurikulum Pondok

1. NAHWU
2. SHARAF
3. FIKIH
4. TAFSIR JALALEN
5. AKHLAQUL BANIN
6. TARIKH
7. USHUL FIQ
8. DARDIR
9. TAUHID
10. HIKAM
11. DURATUN NASIHIN
12. HADIST
13. ILMU TAFSIR

### Tenaga Pendidik yang berpengalaman

#### Guru Umum

1. Dra. Lastri Fayeti
2. Murni Hidayah Subeakti, S.Pd
3. Teguh Pramono, S.Pd
4. Fitria Ningsih, S.Pd
5. Desniarti Herpika, S.Pd
6. Susilawati, S.Pd
7. Marsudi, S.Pd
8. Wakini, S.Pd
9. Eva Sulastri Ningsih, S.Pd
10. Hj. Darnatius, S.Pd
11. Indang Suslawati, S.Pd
12. Sukiyato, A.Md
13. Yulia Ningsih, S.Pd
14. Yoza Oktaviana, S.Pd
15. Alna Arnita, S.Pd

#### Guru Agama / Kitab Kuning

1. Ustd. Syawal Yunus
2. Buya Hamzah bilal
3. Ustd. Ahmad Darori, S.Pdi
4. Ustd. Abdul Halim
5. Ustd. Zainal Efendi
6. Ustd. M Rafi Hasroni
7. Ustd. Zalwit, S.Thi
8. Ustd. Yusri, S.Pdi
9. Ustd. M. Yunus
10. Ustd. Subhan
11. Ustd. Andi, S.Iq
12. Ustzah. Marhatiyus
13. Ustzah. Eva Karmila, S.Pdi
14. Ustzah. Asmarni, A.Md
15. Ustd. Bustanudin, S.Ag

## Letak Geografis Kompleks Pondok Pesantren " Darul Hikmah "

Di pinggir Lintas Sumatera Koto Baru Dharmasraya  
Jauh dari kebisingan  
Jauh dari pengaruh lingkungan pergaulan bebas

Transportasi mudah dan lancar  
Aman dan tentram dalam menuntut ilmu



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 7.-



Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas September tahun --  
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (14-9-1994). ---

Menghadap kepadanya, ELDANI Sarjana Hukum, Notaris di --  
Solok, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, ---  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---

= Tuan MASRI DATUK RAJO SELAN, Tani, bertempat tinggal di --  
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, ---  
Desa Koto-Koto Baru, Gang Mekar; ---

(- pada waktu menandatangani akta ini sedang berada di --  
Solok); ---

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

- a. untuk diri sendiri; ---
- b. berdasarkan kuasa lisan dari dan sebagai demikian --  
sah mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab  
sepenuhnya untuk dan atas nama : ---

1. Tuan MUHAMAD TASHA DATUK BONDO RAJO, Pensiunan --

2. Nyonya HABIBAH, Ibu Rumah Tangga; ---

3. Nyonya HASYMITA, Ibu Rumah Tangga; ---

4. Nyonya MARHATIYUS, Ibu Rumah Tangga; ---

5. Tuan KHAI RUDDIN, Sarjana Ekonomi, Pegawai Negeri --

Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten ---

Sawahlunto Sijunjung, sama pada alamat tersebut --

di atas; ---

6. Tuan ARLIS USMAN, Karyawan Bank Pembangunan ---

di atas; ---

7. Tuan ARLIS USMAN, Karyawan Bank Pembangunan ---

di atas; ---







Dzarah-Sumatera Barat Cabang Koto Baru, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Sawahlunto -----  
Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, Desa Koto-Koto-  
Baru; -----

7. Tuan MURSYIDIN, Pegawai Negeri Sipil, bertempat  
tinggal di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, -----  
Kecamatan Muaro Garbok, Jalan Piere Tendean -----  
Nomor 326, Rukun Tetangga VII; dan -----

8. Tuan SYAWAL YUNUS, Tani, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kecamatan Koto-  
Baru, Desa Koto-Koto-Baru, Gang Manggis Koto; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap yang telah saya, Notaris, kenal, tetap bertindak  
seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- bahwa berdasarkan akta tertanggal duapuluh lima Nopember  
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (25-11-1993)

Nomor 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, oleh -----

penghadap Tuan MASRI DATUK RAJO SELAN bersama-sama dengan -----

Tuan MUHAMAD TASAH DATUKABONDO RAJO, Nyonya HABIBAH, -----

Nyonya HASYMITA, Nyonya MARHATIYUS, Tuan KHAIRUDDIN, -----

Sarjana Ekonomi, Tuan ARLIS USMAN, Tuan MURSYIDIN dan -----

Tuan SYAWAL YUNUS, telah didirikan YAYASAN dengan nama -----

YAYASAN PONDOK PESANTREN TASAWIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTO

BARU, KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG, -----

berkedudukan di Sawahlunto/Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, -----

yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan -----

Negeri Muaro Sijunjung, pada hari Kamis tanggal sepuluh -----

Pebruari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat, -----

dibawah Register Nomor : 02/BDH/1994/PN.MR; -----

- bahwa para pendiri bermaksud mengadakan perubahan nama -----





dari Yayasan tersebut di atas, karena sebutan TASAWIYAH --  
mirip dengan sebutan TSANAWIYAH yang mana telah meragukan --  
masyarakat, sehingga surat-surat dari Kantor Departemen --  
Agama-Daerah Tingkat II di Sawahlunto Sijunjung atau surat --  
surat lain sering tidak sampai dan segala kepentingan --  
untuk Yayasan TASAWIYAH kesasar ke TSANAWIYAH atau --  
tempat lain. -----

Berhubung dengan hal-hal yang sudah diuraikan di atas maka

Para Pendiri bermaksud mengadakan Perubahan Anggaran Dasar  
sebagai berikut : -----

Menghapuskan seluruh pasal 1 dan menggantinya dengan --  
pasal 1. baru, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Nama dan tempat kedudukan -----

Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama "YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL-  
HIKMAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTO BARU KECAMATAN KOTO --  
BARU KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG", berkedudukan --  
di Sawahlunto/Sijunjung, untuk pertama kalinya -----  
Yayasan ini mempunyai Kantor Sekretariat di Koto --  
Baru, Kecamatan Koto Baru, dengan cabang-cabang -----  
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain yang --  
dianggap perlu oleh Badan Pengurus. -----

Akhirnya untuk segala urusan perubahan ini dengan segala --  
akibatnya, para pendiri memilih tempat-tinggal hukum yang --  
sah, umum dan tetap, pada Kantor Panitera Pengadilan -----  
Negeri di Muaro Sijunjung. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Solok, pada hari dan tanggal --  
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh --  
Tuan JASMAN Sarjana Hukum dan Nona SRIWIRA, kedua-duanya --



pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Solok

sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada

penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para

saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa paksaan, tanpa coretan dan satu

ambahan.

= Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai "TURUNAN".

Solok, 14 September 1994.-

Notaris di Solok,



(ELDANI, S.H.).-

NOTARIS TARIKAT KOTA BARU KECAMATAN KOTO

"SEMILANGSUNG" (MAYOR) MUARA MUARA

REGNO: 07/BDE/1994/PN.MR.

Pada hari ini : RADU, tanggal 14 bulan SEPTEMBER tahun 1990  
SEMBILAN PULUH EMPAT "PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PONDOK -  
PESANTREN TASAL MIYAH TARIYAH ISLAMIAH KOTO BARU KECAMATAN KO-  
TO BARU KABUPATEN SAWAHJUNTO/SIJUNJUNG" telah didaftarkan di Ke-  
paniteraan Pengadilan Negeri Muaro di bawah Nomor:07 (NOL TUJUH).



PALESTRA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MUARO,

SYAFRI, HMY, SH.

NIP. 040035485.



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 7.-



Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas September tahun --  
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (14-9-1994). ----

Menghadap, kepada saya, ELDANI Sarjana Hukum, Notaris di --  
Solok, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, ----  
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----

= Tuan MASRI DATUK RAJO SELAN, Tani, bertempat tinggal di --  
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, ---  
Desa Koto-Koto Baru, Gang Mekar; -----

(- pada waktu menandatangani akta ini sedang berada di -  
Solok); -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri; -----
- b. berdasarkan kuasa lisan dari dan sebagai demikian --  
sah mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab  
sepenuhnya untuk dan atas nama : -----

1. Tuan MUHAMAD TASA DATUK BOND RAJO, Pensiunan -  
Departemen Agama; -----

2. Nyonya HABIBAH, Ibu Rumah Tangga; -----

3. Nyonya HASYMITA, Ibu Rumah Tangga; -----

4. Nyonya MARHATIYUS, Ibu Rumah Tangga; -----

Keempatnya bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Sawahlunto Sijunjung, sama pada alamat tersebut-  
di atas; -----

5. Tuan KHAIRUDDIN, Sarjana Ekonomi, Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Sawahlunto Sijunjung, Jalan Rasuna Said Nomor -  
F.10 Muaro Sijunjung; -----

6. Tuan ARLIS USMAN, Karyawan Bank Pembangunan ---





Daerah Sumatera Barat Cabang Koto Baru, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Sawahlunto -----  
Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, Desa Koto-Koto  
Baru; -----

7. Tuan MURSYIDIN, Pegawai Negeri Sipil, bertempat  
tinggal di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, -----  
Kecamatan Muaro Gambok, Jalan Piere Tendean -----  
Nomor 326, Rukun Tetangga VII; dan -----

8. Tuan SYAWAL YUNUS, Tani, bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kecamatan Koto-  
Baru, Desa Koto-Koto Baru, Gang Manggis Koto; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia. -----

Penghadap yang telah saya, Notaris, kenal, tetap bertindak  
seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- bahwa berdasarkan akta tertanggal duapuluh lima Nopember  
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (25-11-1993)

Nomor 11, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, oleh -----

Penghadap Tuan MASRI DATUK RAJO SELAN bersama-sama dengan -----

Tuan MUHAMAD TASAH DATUK BONDORAJO, Nyonya HABIBAH, -----

Nyonya HASYMIITA, Nyonya MARHATIYUS, Tuan KHAIRUDDIN, -----

Sarjana Ekonomi, Tuan ARLIS USMAN, Tuan MURSYIDIN dan -----

Tuan SYAWAL YUNUS, telah didirikan YAYASAN dengan nama -----

YAYASAN PONDOK PESANTREN TASAWIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTO

BARU, KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG, -----

berkedudukan di Sawahlunto/Sijunjung, Kecamatan Koto Baru, -----

yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan -----

Negeri Muaro Sijunjung, pada hari Kamis tanggal sepuluh -----

Pebruari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat, -----

dibawah Register Nomor : 02/BDH/1994/PN.MR; -----

- bahwa para pendiri bermaksud mengadakan perubahan nama -----



dari Yayasan tersebut di atas, karena sebutan TASAWIYAH --  
mirip dengan sebutan TSANAWIYAH yang mana telah meragukan-  
masyarakat, sehingga surat-surat dari Kantor Departemen --  
Agama Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung atau surat ---  
surat lain sering tidak sampai dan segala kepentingan ----  
untuk Yayasan TASAWIYAH kesasar ke TSANAWIYAH atau -----  
ketempat lain. -----

Berhubung dengan hal-hal yang sudah diuraikan di atas maka  
para Pendiri bermaksud mengadakan Perubahan Anggaran Dasar  
sebagai berikut : -----

= Menghapuskan seluruh pasal 1 dan menggantinya dengan ---  
pasal 1. baru, yang berbunyi sebagai berikut : -----

----- Nama dan tempat kedudukan -----

----- Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama "YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL-  
HIKMAH TARBIYAH ISLAMIYAH KOTO BARU KECAMATAN KOTO -  
BARU KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG", berkedudukan -  
di Sawahlunto/Sijunjung, untuk pertama kalinya ----  
Yayasan ini mempunyai Kantor Sekretariat di Koto ---  
Baru, Kecamatan Koto Baru, dengan cabang-cabang ----  
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain yang -  
dianggap perlu oleh Badan Pengurus. -----

Akhirnya untuk segala urusan perubahan ini dengan segala -  
akibatnya, para pendiri memilih tempat-tinggal hukum yang-  
sah, umum dan tetap, pada Kantor Panitera Pengadilan ----  
Negeri di Muaro Sijunjung. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Solok, pada hari dan tanggal --  
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh --  
Tuan JASMAN Sarjana Hukum dan Nona SRIWIRA, kedua-duanya -



pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Solok  
sebagai saksi-saksi. -----

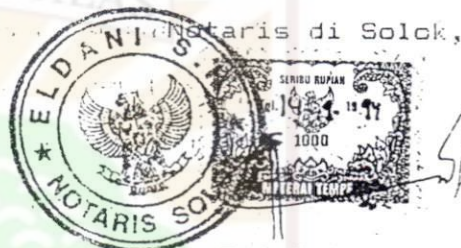
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para  
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan satu  
tambahan. -----

= Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai "T U R U N A N". -----

Solok, 14 September 1994. -----



(E. DANI, S.H.).- -----

REGNO: 07/BDE/1994/PN.MR.

Pada hari ini : RADU, tanggal 14 bulan SEPTEMBER tahun 1990  
SEMBILAN PULUH EMPAT "PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PONDOK -  
PESANTREN TASA' WIYAH TARBIYAH ISLAMIAH KOTO BARU KECAMATAN KO-  
TO BARU KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG " telah didaftarkan di Ke-  
panitera-an Pengadilan Negeri Muaro di bawah Nomor:07 (NOL TUJUH).



SYAFRI. HMY. SH. =

NIP. 040035485.